

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *MUT'AH*
MENURUT M. QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**NI'MATUN NIZLAH
NIM. 2103164**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ni'matun Nizlah

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ni'matun Nizlah

Nomor Induk : 2103164

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
NIKAH MUT'AH MENURUT M. QURAISH
SHIHAB**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngaliyan 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ni'matun Nizlah
NIM : 2103164
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH
MUT'AH MENURUT M. QURAISH SHIHAB**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

10 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

Penguji I,

Penguji II,

H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 150 290 930

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

MOTTO

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (النساء: 24)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maskawin (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiada berdosa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maskawin itu." (QS. an-Nisa': 24).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak H. Abdul Wahab dan Ibu Hj. Siti Naimah (al-Marhumah)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku.
- **Kakak dan adikku Tercinta (Dik Mila Y.Sahara yang paling cantik, Mbak Lu'luil Makmunah dan Mas Abdul Khaq Alm.)** yang kusayangi yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Orang yang selalu dekat di hati (M. Nor Ridho)** yang selalu memberi semangat dalam menuntaskan studi dan skripsi.
- **Teman-Temanku (Acis, Ci', Ana, Sinok, Dain, Muna, Gepek, Zulfa, Kaji, Teman-teman satu paket ASC, Teman-teman Kos an-Nisa dan Teman-teman kerjaku di Sriratu),** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh cita-cita.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

NI'MATUN NIZLAH
NIM. 2103164

ABSTRAK

Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Ditinjau dari segi waktu, nikah itu ada dua macam yaitu nikah *da'im* (nikah kekal) dan nikah *mut'ah* (pernikahan untuk masa tertentu). Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*? Bagaimana *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*? Bagaimana aktualisasi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia?

Jenis penelitian adalah *Library Research*, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber utamanya yaitu karya M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Adapun sumber data sekunder, yaitu karya-karya M. Quraish Shihab yang lain serta buku-buku pendukung. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan nikah *mut'ah* dalam perspektif M. Quraish Shihab dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, dalam situasi darurat bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan guna menghindari perzinahan. Menurut M. Quraish Shihab, salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Karena itu, kalau pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat. Dalil yang digunakan M. Quraish Shihab yaitu hadis dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim. Sedangkan *istinbat* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab adalah *qiyas* yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat ditinggalkan karena *uzur* syar'i, salat yang dapat dijama dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan selain bangkai.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH MUT’AH MENURUT M. QURAISH SHIHAB”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Musahadi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH *MUT'AH*

A. Pengertian Nikah <i>Mut'ah</i>	15
B. Dasar Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	17
C. Syarat dan Rukun Nikah	21
D. Macam-Macam Nikah yang Diharamkan	28
E. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	40

BAB III : PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG NIKAH *MUT'AH*

A. Biografi M. Quraish Shihab	51
1. Latar Belakang, Pendidikan dan Karir	51

2. Karya-karya M. Quraish Shihab	55
B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah <i>Mut'ah</i> dalam Keadaan Mendesak	56
C. Metode M. Quraish Shihab	76

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab	78
B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah	84
C. Aktualisasinya Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah dengan Konteks Pernikahan di Indonesia	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan.¹ Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Ditinjau dari segi waktu, nikah itu

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: Islamic Book Service by American Trust Publication, 1977, hlm. 50.

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

ada dua macam yaitu nikah *da'im* (nikah kekal) dan nikah *mut'ah* (pernikahan untuk masa tertentu).⁴

Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari pernikahan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada pernikahan biasa dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.⁵

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* itu yang dijadikan dalil

⁴Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1346.

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393. Uraian lebih dalam dikupas dalam Sachiko Murata, *op.cit.*, hlm.89.

oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah ini ialah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulunya sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama kebolehan, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehan bersifat diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* menjelaskan bahwa meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.⁷

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 394.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

Dengan mencermati paparan di atas, maka salah seorang ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".⁸

Pendapatnya yang kontroversial ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama yaitu M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya.

Adapun sebabnya memilih tokoh M. Quraish Shihab sebagai berikut: *pertama*, karena selain salah seorang ahli tafsir kontemporer di Indonesia, ia juga banyak menaruh perhatian terhadap persoalan perkawinan yang selama ini berkembang. *Kedua*, Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an

⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 187.

lainnya. *Ketiga*, dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan,

menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.⁹

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti memilih judul: *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH MUT'AH MENURUT M. QURAISH SHIHAB*

B. Perumusan Masalah

Mencermati latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*?
2. Bagaimana *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*?
3. Bagaimana aktualisasi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*
3. Untuk mengetahui aktualisasi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia

⁹Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 110-112.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum menyentuh pada persoalan nikah *mut'ah* perspektif M. Quraish Shihab. Meskipun demikian sudah banyak karya-karya ilmiah yang membahas masalah nikah *mut'ah*, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lulu Muzayyanah dengan judul: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*. Menurut Hasbullah Bakry bahwa nikah *mut'ah* itu sah tanpa ragu, dan pergaulannya halal. Untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab-kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar. Beberapa perhatian untuk kebaikan nikah *mut'ah* itu sebaiknya jumlah mahar dan nafkah lahir (uang belanja) serta uang belanja dimasa iddah setelah ditinggal (tertalak) hendaklah semua telah disepakati di antara calon suami istri *mut'ah* itu, walaupun lamanya waktu serta belanja dimasa iddah tidak disebut di kala akad nikah. Pembayaran semua juga dilakukan secara tunai.

Hasbullah Bakry membolehkan nikah *mut'ah* mendasarkan kepada hadis riwayat Muslim yang menyatakan: sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*." (HR. Muslim).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*. Menurutny bahwa para ahli fiqih Islam selain Syi'ah

berkonsensus (*ijma'*) bersama bahwa pernikahan *mut'ah* adalah haram hukumnya dan batil, karena Rasulullah telah melarangnya setelah pernah di perbolehkan disebabkan kondisi tertentu. Dan ketika Rasulullah memperbolehkan nikah *mut'ah*, ia mempunyai beberapa syarat:

1. Diperbolehkan bagi musafir yang benar-benar membutuhkan itu
2. Harus dengan hadir wali perempuan dan dua orang saksi
3. Mahar harus disepakati secara bersama
4. Ketika masanya sudah habis, perempuan harus menunggu iddah hingga jelas apakah ia hamil atau tidak.
5. Nasab anak ditetapkan kepada suami

Maka jelaslah perbedaan antara pernikahan abadi dengan pernikahan *mut'ah* yang pernah diperbolehkan oleh Nabi saw yang kemudian dilarang. Perbedaannya adalah waktu (masa pernikahan) dan kesepakatan tidak adanya waris-mewarisi antara kedua suami-istri.

Adapun nikah *mut'ah* yang didengungkan oleh golongan Syi'ah sekarang, bukan nikah *mut'ah* yang pernah diperbolehkan Nabi saw kemudian dilarang untuk selama-lamanya pada waktu haji wada'.

Ketiga, skripsi yang disusun Ahmad Fauzan: "*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Nikah Mut'ah*". Ada perbedaan pendapat antara nikah *mu'allaq* (gantung) dengan nikah *mut'ah*. Orang yang melakukan nikah *mu'allaq* berniat bahwa ia tidak akan berdiam bersama istrinya kecuali pada masa yang telah diniatkannya. Imam Nawawi berpendapat, "Mereka sependapat bahwa siapa yang melakukan pernikahan *mu'allaq* dan berniat tidak akan berdiam bersama

istrinya kecuali pada masa yang telah diniatkannya, nikahnya sah dan halal, dan bukan lah termasuk kategori nikah *mut'ah*, sedangkan nikah *mut'ah* adalah nikah yang dilakukan dengan syarat-syarat tersebut di atas."

Menurut Imam Malik, "Pernikahan yang seperti itu berlawanan dengan akhlak yang mulia," sedangkan Imam al-Auza'i berpendapat, "Itu termasuk hal yang menyimpang. Pernikahan *mu'allaq* termasuk dalam kategori *mut'ah* tidak ada kebaikan sedikit pun dalam perbuatan itu."

Keempat, skripsi yang disusun oleh Amir Machmud, *Studi Komparasi Pemikiran Prof. M. Quraish Shihab dan Prof. Ali Yafie tentang Insan Kamil dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Menurut M. Quraish Shihab, melalui debu tanah dan Ruh Ilahi, Allah menganugerahkan manusia empat daya, yaitu daya tubuh, daya hidup, daya akal, dan daya kalbu. Apabila keempat daya itu, digunakan dan dikembangkan secara baik, maka kualitas pribadi akan mencapai puncaknya yaitu insan kamil. Yaitu satu pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan, ilmu pengetahuan, keterampilan, keuletan serta wawasan masa depan, dan dengan fisik yang sehat. Sedangkan menurut Ali Yafie, insan kamil, adalah manusia yang memiliki keseimbangan (mental), yang dapat memadukan kehidupan pribadinya sebagai individu dan kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat. Manusia semacam ini, sebagaimana hasil kajiannya terhadap al-Qur'an, adalah manusia yang memiliki kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi ini tidak sendiri. Dia bersama dengan sesama manusia, dia bersama dengan makhluk dan benda lain yang juga ciptaan Tuhan.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ita Musahadah dengan judul: *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmat*." Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi yang telah disebut belum mengungkap dan menyentuh pendapat M. Quraish Shihab serta belum membahas tentang hukum darurat sebagaimana dideskripsikan M. Quraish Shihab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu karya M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
2. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994; *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2008; *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002; *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005; *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006; *Menabur Pesan Ilahi*, Bandung: Mizan 2005; Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001; Sachiko Murata, *Temporary*

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21 - 22.

Marriage in Islamic Law, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001; Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970; Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006; Chuzaimah T Yanggo, dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a. Mengumpulkan kitab-kitab fiqh; b. memilih kitab-kitab fiqh tertentu; c. membaca kitab fiqh yang telah dipilih; d. mencatat isi kitab; e. menterjemahkan isi catatan; f. menyarikan isi catatan; g. mengklasifikasikan sari tulisan; h. klasifikasi yang lebih spesifik.¹² Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa

¹²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 89

masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan nikah *mut'ah* perspektif M. Quraish Shihab dengan pendekatan yuridis sosiologis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi konsep nikah *mut'ah* yang meliputi pengertian nikah *mut'ah* dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, macam-macam nikah yang diharamkan, pendapat para ulama tentang hukum nikah *mut'ah*.

Bab ketiga berisi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* yang meliputi biografi M. Quraish Shihab (latar belakang, pendidikan dan karir, karya-karya M. Quraish Shihab), pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dalam keadaan mendesak, metode M. Quraish Shihab.

Bab keempat berisi analisis pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah yang meliputi analisis hukum Islam terhadap nikah mut'ah menurut M. Quraish Shihab, analisis terhadap metode *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah, aktualisasinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah dengan konteks pernikahan di Indonesia

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH *MUT'AH*

A. Pengertian Nikah *Mut'ah*

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), perkawinan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁴Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.

Adapun kata *mut'ah* mempunyai sekian arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain-lain.⁵ Kata *mut'ah* adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya:

Kesenangan, seperti dalam firman Allah: مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (QS. 3:14)

Alat perlengkapan, seperti firman Allah: مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلْغَيَّارَةِ (QS. 5: 96)

Pemberian, seperti dalam firman Allah: وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ (QS. 2: 236).⁶

Secara etimologi, kata *mut'ah* dalam kamus *Lisan al-'Arab*, Ibn Manzûr mengatakan, "*Mut'ah* (المتعة) adalah bersenang-senang dengan perempuan, tapi tidak menginginkannya kekal bersamamu. Al-Azhari berpendapat, "*al-Mataa'u* (المتاع) adalah setiap apa yang bermanfaat."⁷ Secara terminologi, terdapat berbagai rumusan yang berbeda namun tampaknya hanya dalam redaksi, sedangkan substansi hampir sama, misalnya dapat disebut di bawah ini:

1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan. Disebut nikah *mut'ah*, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki

⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 188.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 100

⁷Muhammad Fu'ad Syakir, *Nikah Terlarang*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 65.

dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.⁸

2. Menurut Muhammad Fu'ad Syakir, *mut'ah* (المتعة) adalah "akad nikah yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak."⁹
3. Sayyid Sabiq menyatakan:

ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً زواج المتعة

Artinya: Disebut juga nikah *mut'ah* atau nikah terputus, oleh karena laki-laki yang menikahi perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.

B. Dasar Hukum Nikah Mut'ah

Dasar hukum nikah *mut'ah* sebagai berikut:

⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 366.

⁹Muhammad Fu'ad Syakir, *Zawajun Bathil: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, "Nikah Terlarang: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah", Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 65

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 130.

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامِ الْعِيشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ (رواه مسلم) ¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

Adapun dalil mereka (ahli sunnah wal jamaah) mengharamkan nikah *mut'ah* itu ialah Hadits Ahad juga yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمَتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم) ¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhamamad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Abu Umais dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya. dia berkata: Pada tahun Authas atau tahun peristiwa penaklukan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. memberikan kemurahan melakukan nikah *mut'ah* selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim).

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ

¹¹Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 54.

¹²*Ibid.*, hlm. 131.

ناسا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يَفْتَنُونَ بِالْمَتْعَةِ يَعْرِضُ
 بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجُلْفٌ جَافٌ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمَتْعَةُ تَفْعَلُ
 عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يَرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ
 ابْنُ الزَّيْبُرِ فَجَرَّبْتُ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَشُنْ فَعَلْتَهَا لِأَرْجَمَنَّكَ بِأَخْجَارِكَ قَالَ
 ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفٍ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ
 جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمَتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ
 ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ
 إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ إِنَّهَا كَانَتْ رَخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَمَنْ
 اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى
 عَنْهَا قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ
 كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ
 بَنِي عَامِرٍ بَبَرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 الْمَتْعَةِ (رواه مسلم) ¹³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair; sesungguhnya Abdullah bin Zubair pernah berpidato di kota Makkah: "Semoga Allah membutakan hati dan mata orang-orang yang berani memberikan fatwa dibolehkannya nikah *mut'ah*". Seorang laki-laki serta merta maju dan berseru kepadanya: "Sesungguhnya kamu itu orang yang sangat picik. Demi umurku, pada zaman Rasulullah s.a.w. nikah macam itu sudah diberlakukan". Abdullah bin Zubair lalu berkata kepada laki-laki yang mengumpatnya itu: "Celaka kamu! Demi Allah, kalau sampai kamu berani melakukannya, maka aku tidak akan segan-segan melemparimu dengan batu." Seperti yang disitir oleh Ibnu Syihab, Khalid bin Al Muhajir bin Saifullah punya pengalaman tersendiri mengenai hal itu. Kata Khalid: "Ketika aku tengah berada di sisi salah seorang temanku,

¹³ Ibid., hlm. 56.

tiba-tiba muncul seorang lelaki yang meminta fatwa kepadanya mengenai masalah *mut'ah*. Temanku itu memperbolehkannya. Namun Ibnu Abu Amrah yang kebetulan berada di antara kami cepat menyela: "Sebentar. Jangan buru-buru terlebih dahulu." Temanku tadi bengong dan bertanya: "Kenapa? Demi Allah, bukankah ini pernah dipraktekkan?" Ibnu Abu Amrah berkata: "Betul. Pada permulaan Islam, hal ini memang merupakan kemurahan yang diberikan kepada orang yang memang sudah terpaksa. Masalah ini tidak ubahnya seperti diperbolehkannya memakan bangkai, darah, dan daging babi bagi orang yang memang sudah sangat terpaksa. Kemudian setelah Allah menegakkan peraturan agama, hal itu lalu dilarang-Nya." Rabi' bin Sabrah Al Juhani mengatakan, bahwa ayahnya mengatakan: "Pada zaman Rasulullah s.a.w. aku memang pernah melakukan kawin *mut'ah* dengan seorang wanita dari Bani Amir, dengan imbalan maskawin berupa dua lembar kain selimut berwarna merah. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarangnya." (HR. Muslim).

Kemudian ada suatu hadis lagi haramnya *mut'ah* itu yang berbunyi:

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيُنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُمَيْيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مَنْ يَوْمَكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (رواه مسلم) ¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Sabib dari al-Hasan bin A'yan dari Ma'qil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin Abdul Aziz diceritakan oleh Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang dari nikah *mut'ah*. Beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa sejak hari ini nikah *mut'ah* itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali. (HR. Muslim).

¹⁴*Ibid.*, hlm. 56.

C. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁵ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁶ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁷ melazimkan sesuatu.¹⁸

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁰ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁷Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁸Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

¹⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁰Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²¹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²²

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Nikah Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa nikah adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²³

Bagi ummat Islam, nikah itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Nikah Islam, Suatu Akad Nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad perkawinan ada lima dan setiap rukun diikuti dengan syarat sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

²²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

²³Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Nikah di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.

- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.²⁴

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.

5. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau

²⁴Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun nikah dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

"tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"

- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.²⁵
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.

²⁵Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.²⁶
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad nikah

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".

²⁶Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

- 2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".²⁷
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa

²⁷*Ibid*, hlm. 26.

Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".²⁸

D. Macam-Macam Nikah yang Diharamkan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat nikah yang keduanya harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun nikah itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah yang *fasid* (rusak) dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan pernikahannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara pernikahan yang terlarang itu adalah nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* dan nikah *syighar*.

1. Nikah *Mut'ah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja.²⁹

²⁸Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

²⁹Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 40.

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah *mut'ah* pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- b. *Lafaz ijab* yang berbeda.
- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus
- d. Tidak ada nafkah '*iddah*'.³⁰

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidentil, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan.

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah SAW. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada pemuda Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

jarak dan sulitnya medan dan kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka diberi dispensasi untuk melakukan nikah sesaat. Setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut.³¹

2. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.³²

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

³¹*Ibid.*, hlm. 32.

³²Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230).³³

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.³⁴

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

³⁴ Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 43 – 44.

menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang, disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.³⁵

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya". Dalam bentuk ini nikah *tahlil* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

3. Nikah Syighar

Secara etimologi, dalam *Kamus al-Munawwir*, *syigar* adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar (الشَّغَارُ).³⁶ Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia*, *syigar* (الشَّغَارُ) berarti kawin-mengawinkan

³⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 21.

³⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 727.

kepada perempuan tanpa mas kawin.³⁷ Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata *syighar* di dalam bahasa Arab berarti "anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing". Kata ini juga berarti "kosong dan tidak berpenghuni". Sebagai contoh, kata-kata *baladun syaghirun*, yang berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan.³⁸ Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah saw melarang nikah syigar, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan puterimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawannya.³⁹

Secara terminologi, dalam kitab sahih Bukhari dijumpai rumusan kata *syigar* sebagai berikut:

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخاري)⁴⁰

³⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 199.

³⁸Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 248

³⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 387.

⁴⁰Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 260.

Artinya: Telah mengabarkan kepada Kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *syigar*. Nikah *syigar* itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawini anaknya tadi) juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana antara keduanya tidak terdapat maskawin (mahar) (HR. al-Bukhari)

Pengertian nikah *syigar* dalam hadis di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa nikah *syigar* ialah apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Maskawinnya hanya alat vital perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.⁴¹ Definisi ini sama juga dengan Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud nikah *syigar* adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengan tanpa bayar mahar.⁴²

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, op.cit., hlm. 130.

mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa jahiliyyah sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw mengharamkan pernikahan jenis ini.

Seandainya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada laki-laki lainnya, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku," dan pernikahan itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan kepada masing-masing perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Dalam pandangan mayoritas fukaha, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana. Di dalam pernikahan *syigar*, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Imam Nawawi sebagaimana dikutip Ahmad asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fukaha telah sepakat bahwa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau wanita-wanita yang lain, juga mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri, pada pengharaman nikah *syigar*.⁴³

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan

⁴³Ahmad asy-Syarbashi, *op. cit*, hlm. 248.

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.⁴⁴

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:⁴⁵

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁴⁶

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

⁴⁴Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14 – 16

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110.

2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.⁴⁷

3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.⁴⁸

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin)

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14 – 16.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 111.

untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.⁴⁹

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

⁴⁹Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.
5. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁵⁰

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyalah-nyai kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk

⁵⁰Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁵¹

E. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Nikah Mut'ah

Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin mut'ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Makkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah *qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Makkah dan Yaman.⁵²

Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas r.a. beralasan dengan firman Allah berikut ini:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (النساء: 24)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maskawin (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiada berdosa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maskawin itu." (QS. an-Nisa': 24).

⁵¹*Ibid*, hlm. 16.

⁵²Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 43.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa pada permulaan Islam nikah *mut'ah* itu haram hukumnya. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum haram tersebut telah dinasakhkan, Artinya, nikah *mut'ah* telah dibolehkan setelah pada mulanya diharamkan.

Yang menjadi masalah di kalangan fuqaha ialah tentang hukum nikah *mut'ah* setelah dibolehkan itu, apakah kebolehan nya terus berlaku sampai sekarang, atau telah dibatalkan sehingga diharamkan. Hal ini terjadi karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi telah melarang nikah *mut'ah* itu setelah sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra di kalangan sahabat, sampai kepada fuqaha. Mereka terpisah menjadi dua golongan: **golongan pertama** mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak dan **golongan kedua** membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak.⁵³

Pendapat **golongan pertama** yang memandang haramnya nikah *mut'ah* secara mutlak, terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari; dan kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut *jumhur*. Adapun dalil-dalil yang mereka ajukan untuk mendukung pendapat mereka antara lain:⁵⁴

1. Nikah *mut'ah* itu tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan pensyari'atan thalak, *iddah* dan pusaka. Jadi nikah seperti ini batal sebagaimana bentuk nikah-nikah lainnya yang dibatalkan Islam. Perhatikan Q.S. Al-Mukminun '(23) : 5-6;

⁵³Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 64

⁵⁴Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 130.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون: 5-6)

Artinya: (Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri atau jariah mereka, maka tidak mendapat cercaan Tuhan (QS. Al-Mukminun '(23): 5-6).⁵⁵

Ayat-ayat ini menjelaskan secara nyata bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah; sedangkan wanita yang diambil dengan cara *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri dan juga tidak sebagai jariah. Dia bukan jariah, karena akad *mut'ah* bukan akad jual-beli. Dia juga tidak berfungsi sebagai isteri, karena akad nikah *mut'ah* tidak dipandang sebagai akad nikah, karena:

- a. Tidak saling mewarisi; sedang akad nikah menjadi sebab timbulnya hak waris-mewarisi.
- b. Iddah nikah *mut'ah* tidak seperti iddah nikah biasa.
- c. Dengan nikah *mut'ah* seseorang tidak dikurangi haknya untuk beristeri lebih dari empat orang, sementara itu dengan nikah biasa hak seseorang hanya terbatas untuk beristeri sampai empat orang saja.⁵⁶
- d. Lewat nikah *mut'ah* seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang dikawini dengan nikah *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita itu berstatus isteri dan

⁵⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 526.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 131.

tidak pula berstatus jariah. Karena itu mereka yang melakukan nikah *mut'ah* termasuk dalam Q.S. Al-Mukminun (23) : 7,

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: 7)

Artinya: Barangsiapa menuntut selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas.⁵⁷

2. Banyak hadis yang meriwayatkan dengan tegas haramnya nikah *mut'ah*, dan telah terhapusnya hadis-hadis yang membolehkannya. Antara lain:

a. Hadis riwayat Muslim dari Sabrah al-Juhniy dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عمر حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ
لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ كَانَ عَنْدهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya: Telah Mengabarkan Kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Abi dari Abdul 'Aziz bin Umar dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhniy dari Bapaknya sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan *mut'ah* dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan *mut'ah* itu sampai hari Qiyamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah *mut'ah*, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (HR. Muslim).

⁵⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 130.

⁵⁸Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz.II, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 132.

- b. Hadis riwayat Muslim dari Salamah, Rasul bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمَتْنَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ
نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Ziad dari Abu 'Umais dari Iyas bin Salamah dari Bapaknya berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah memberikan *rukhsah* pada tahun Authas mengenai *mut'ah*, selama tiga hari, kemudian. beliau melarangnya. (HR. Muslim).

Kata-kata *rakhkhasha* dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa *mut'ah* itu dilarang, kemudian dibolehkan secara *rukhsah*; *kerukhsahan* itu menunjukkan bahwa kebolehan adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, maka kembali ke hukum asalnya dan timbullah larangan Rasul dengan sabdanya *tsumma raha 'anha* (kemudian Nabi melarangnya).

Bila menganalisa Q.S. Al-Mukminun {23} : 5,6,7 dan H.R. Muslim dari Salamah ibn at-Akwa' menurut versi penafsiran Jumhur, maka nikah *mut'ah* menurut mereka dapat disimpulkan secara kronologis sebagai berikut:

- Pada awal Islam hukum nikah *mut'ah* itu boleh.
- Kemudian kebolehan nikah *mut'ah* itu di-*nasakh* (dibatalkan) oleh Q.S. al-Mukminun (23) : 5,6,7.

⁵⁹*Ibid*, Juz. 2, hlm. 131.

- Kemudian pada beberapa peperangan dibolehkan kembali secara *rukhsah*, karena ada darurat.
 - Setelah habis masa perang dan hilang daruratnya maka *rukhsahnya* pun ikut batal, karena itu diharamkan kembali.
 - Pada *Hajjatul Wada* Rasulullah Saw mempertegas lagi hukum haramnya nikah *mut'ah* itu.⁶⁰
- c. H.R. Malik dari Ibn Syihab dari Abdullah dan al-Hasan, keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ia berkata:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِنْسِيَّةِ (رواه مسلم)⁶¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Qaza'ah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan al-Hasan keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ra. Bahwa Rasulullah Saw melarang nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai piaraan (HR. Muslim).

Hadis ini telah banyak dikomentari dalam berbagai kitab hadis, fiqh, tafsir ayat ahkam, dan lain-lain⁶² yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Yang benar ialah bahwa *mut'ah* diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Sebab, dalam Shahih Muslim disebutkan

⁶⁰Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *op.cit.*, hlm. 66.

⁶¹Imam Bukhari, *op.cit.*, hlm. 51.

⁶²Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 211 – 213.

bahwa mereka (anggota pasukan muslimin) bermut'ah pada tahun penaklukan Makkah ketika bersama Rasulullah Saw dan atas izinnya. Karenanya, sekiranya mut'ah telah diharamkan pada waktu perang Khaibar, seperti dalam hadis riwayat Ali di atas, hal ini berarti telah terjadi *naskh* (penghapusan hukum) atas mut'ah sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak memiliki preseden dalam syari'at dan tidak pernah terjadi pada hukum syari'at lainnya. Oleh sebab itu, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam urutannya, yakni bahwa Nabi Saw melarang makan daging keledai piaraan pada peristiwa Khaibar dan melarang mut'ah (tanpa menyebutkan waktunya). Adapun tentang waktunya, telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Makkah. Imam Syafi'i telah menerima hadis itu seperti apa adanya, lalu berkata: "Tak kuketahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi oleh-Nya, kecuali mut'ah".

3. Umar r.a. telah mengharamkan mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa khilafahnya, dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu.
4. Ijma'. Al-Khaththabi berkata bahwa pengharaman mut'ah boleh dibilang seperti Ijma'; kecuali dalam mazhab sebagian kaum Syi'ah. Padahal,

menurut kaidah mereka (kaum Syi'ah) apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. Sedangkan menurut hadis Ali di atas, disebutkan bahwa *mut'ah* telah dilarang (di-*mansukh*). Juga al-Baihaqy menukil ucapan Ja'far Al-Shadiq ketika ditanya tentang hukum *mut'ah*, katanya: "Itu sama saja dengan zina."

5. Berdasarkan penalaran, *mut'ah* hanya bertujuan melampiaskan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli nikah. Maka ia lebih menyerupai perzinaan dalam hal mencari kepuasan syahwat semata-mata. Selain itu *mut'ah* merugikan pihak wanita, sebab ia menjadi seperti barang dagangan, yang berpindah-pindah dari tangan ke tangan. *Mut'ah* juga memberi mudarat bagi anak-anak hasil nikah itu, sebab mereka tidak mempunyai "rumah" untuk didiami secara tenteram serta tidak ada ayah yang mengurus dan mendidik mereka. Sesungguhnya Allah mengharamkan zina karena akan merusak masyarakat dan akhlak, Bila dibolehkan *mut'ah* seolah-olah melestarikan zina dengan nama lain, karena tidak ada artinya mengharamkan zina dan membolehkan *mut'ah*. Padahal Allah melarang wanita yang menyewakan dirinya, dan itulah yang dilarang di zaman Jahiliyah dengan Q.S. Al-Nur (24) : 33.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْدُنَّ تَخَضُّعًا (النور: 33)

Artinya: Dan janganlah paksa budak-budak wanita yang kamu miliki untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. (Q.S. Al-Nur (24) : 33).⁶³

⁶³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 548.

Pendapat **golongan kedua** yaitu fuqaha yang memandang halal nikah *mut'ah* secara mutlak. Mereka terdiri dari kalangan sahabat, seperti Asma' binti Abi Bakr Shiddiq, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amir bin Hurait, Abu Sa'id al-Khudri, Salamah dan Ma'bad; dan dari kalangan Tabi'in: Thaus, Atho', Said ibn Jubair dan seluruh Ulama Fiqh Makkah serta golongan Syi'ah Imamiyah. Untuk mendukung pendapat mereka, dikemukakan beberapa argumentasi:⁶⁴ Q.S. Al-Nisa' (4): 24,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: Dan dihalalkan bagi kamu. sekalian yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. (Q.S. Al-Nisa' (4) : 24).⁶⁵

Cara mereka mengambil dalil dari ayat tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang berbunyi: *an tabtaguu bi amwalikum* (mencari isteri-isteri dengan hartamu), pengertiannya mencakup mencari wanita untuk masa yang tidak terbatas (nikah) dan terbatas (*mut'ah*). Kedua cara tersebut termasuk dalam firman Allah: *wa uhillal lakum maa waraaa dzaalikum* (dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian)

⁶⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *op.cit.*, hlm. 69.

⁶⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 124.

dalam ayat di atas. Dengan demikian menunjukkan bahwa *mut'ah* tetap halal/boleh.

- b. Ayat ini memberitahukan supaya membayar mahar sesudah terjadi *istimta'* (bersenang-senang), hal ini menandakan halalnya nikah *mut'ah*, sebab pada dasarnya keharusan membayar mahar adalah karena akad nikah; dan kalau terjadi perceraian sebelum *istimta'* maka kewajiban membayar mahar hanya sebagian dari jumlah yang ditentukan. Apabila maharnya belum ditentukan, kemudian terjadi perceraian sebelum *dukhul* (hubungan suami isteri) maka tidak ada mas kawin. Jadi dengan semata-mata akad tanpa persetubuhan tidak termasuk dalam pengertian *istimta'*, sebagaimana yang dikehendaki perkataan *fa mastamta'tum* (isteri-isteri yang telah kamu campuri) dalam ayat di atas.
- c. Kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum nikah (bukan hukum *mut'ah*), maka terjadilah pengulangan menerangkan suatu hukum dalam satu masalah yang sama; karena hukum nikah dan keharusan membayar mahar telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tentu hal ini bertentangan dengan *kebalaghahan* al-Qur'an. Tetapi kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum nikah *mut'ah*, maka ini adalah suatu hukum baru; oleh karena itu sebaiknya ayat ini diarahkan kepada hukum yang baru itu.

BAB III

PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG NIKAH *MUT'AH*

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Latar Belakang, Pendidikan dan Karir

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain

Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Summa Cum Laude.¹

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti

¹Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 363 – 364.

dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.²

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta

²Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 111.

di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.³ Jabatan formal hingga sekarang yaitu sebagai anggota *Pentashih* al-Qur'an Departemen Agama RI.

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliyah dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Islam dan Pluralisme*, dalam *Jurnal Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an*, dalam *Jurnal Salafy*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh

³Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365.

rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab"

B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah *Mut'ah* dalam Keadaan Mendesak

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu hingga kini adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Yang menyatakan halal, ada yang demikian longgar dan ada juga yang membolehkannya hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat.⁴

Tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian. Salah satu sebab kesalahpahaman tersebut adalah karena adanya praktik-praktik perzinaan yang dilakukan atas nama nikah *mut'ah* atau karena mereka yang melakukannya itu tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menghalalkan nikah *mut'ah*.⁵

Kata *mut'ah* mempunyai sekian arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal, dan lain-lain. Pakar-pakar hukum Islam baik dari kalangan Sunnah maupun Syi'ah, bahkan Nabi saw. dan sahabat-sahabat

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 187.

⁵ *Ibid.*,

beliau mengenal dua macam *mut'ah*. Yang pertama berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku *mut'ah* haji memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Mereka melakukan umrah terlebih dahulu di musim haji, dan setelah itu mereka dapat menanggalkan pakaian ihram sehingga dapat melakukan apa yang tadinya terlarang dalam konteks berihram. Lalu, apabila tiba masa menuju Arafah untuk melakukan haji, mereka mengenakan kembali pakaian ihram sambil mengindahkan larangannya hingga selesainya ibadah haji.⁶

Mut'ah yang kedua adalah nikah *mut'ah*, yakni pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasar kesepakatan antara calon suami dan istri. Bila berlalu masa yang disepakati, keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan mereka sesuai kesepakatan semula.

Ayat dan Hadits Menyangkut *Mut'ah*

Dalam QS. an-Nisa' [4]: 24 Allah berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban". (QS. an-Nisa' [4]: 24).⁷

Menurut ulama bermazhab Syi'ah, penggalan ayat di atas menunjuk kepada nikah *mut'ah*, yaitu akad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini mereka kuatkan antara lain dengan bacaan dari beberapa sahabat Nabi saw, seperti Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas ra., yang menambahkan kata *ila ajalin musamma* (إلى أجل مسمى) yang berarti sampai

⁶*Ibid.*,

⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 119.

waktu tertentu, setelah kata '*istamta'tum bihi'minhunna*. Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, yakni kata-kata itu bukan merupakan lafadz-lafadz asli ayat, melainkan lafadz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir, ia dapat menjadi pendukung makna.⁸

Karena ayat ini berbicara tentang nikah *mut'ah*, tulis Thabathaba'i yang bermazhab Syi'ah maka mas kawinnya dinamai *ajr*, yakni upah, bukan *shidaq* atau *mahr*. Sepintas, alasan Thabathaba'i ini terlihat logis, tetapi setelah mengamati al-Qur'an, ternyata kitab suci ini menamai maskawin pernikahan putri Nabi Syu'aib as. dengan Nabi Musa as. pun dengan *ajr* (baca QS. al-Qashash [28]: 27), sedangkan pernikahan mereka bukanlah *mut'ah*. Thabathaba'i juga menyatakan bahwa istilah *mut'ah* dan pengamalannya di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. cukup populer dan tidak dapat dipungkiri. Istilah itu masih menurut ulama Syi'ah itu tidak dapat dipahami dalam pengertian kebahasaan, sebagaimana kata haji, riba, atau ghanimah, yang juga tidak dapat dipahami dalam arti kebahasaan karena istilah keagamaan harus dijadikan dasar dalam memahami teks-teks keagamaan, kecuali jika ada indikator kuat yang mengharuskan memahaminya dalam pengertian kebahasaan.⁹

Mayoritas ulama Ahlus Sunnah memahami kalimat *fama istamta'tum bihiminhunna* dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalani secara normal dan, karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan

⁸ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 189.

⁹ *Ibid.*, hlm. 190.

jasmani, maskawin dinamai (أجر) *ajr*, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan.¹⁰

Sementara ulama tafsir dari kelompok Sunni menyatakan bahwa Allah swt. hanya membenarkan dua cara untuk penyaluran nafsu seksual, sebagaimana ditegaskan-Nya ketika menguraikan sifat-sifat orang-orang mukmin, yakni firman-Nya: "Dan mereka menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidaklah dicela. Barangsiapa mencari di balik itu, mereka itulah pelampau-pelampau batas" (QS. al-Mu'minun [23]: 5-7).¹¹

Ayat di atas hanya menyebut dua cara penyaluran nafsu seksual, yaitu melalui pasangan-pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu dan melalui kepemilikan budak perempuan. Dengan demikian, tidak ada cara melalui nikah *mut'ah* karena perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* tidak dapat dinamai istri, bukan juga termasuk budak perempuan yang dimiliki. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad saw., Ibnu Abbas ra.¹² berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنُ عُقْبَةَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ

¹⁰*Ibid.*, hlm. 101.

¹¹*Ibid.*, hlm. 192.

¹²Riwayat tentang pendapat Ibnu Abbas sangat simpang siur. Ada yang menyatakan beliau membenarkan dan melakukan *mut'ah* ada juga yang menyatakan bahwa penghalalan itu sebelum beliau mengetahui adanya larangan Nabi saw.

الْبَلَدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ
 لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ
 (رواه الترمذي)¹³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Ghailan dari Sufyan bin Uqbah saudara Qabishah bin Uqbah dari Sufyan al-Tsauri dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'b dari Ibnu Abbas berkata: sesungguhnya *mut'ah* hanya terjadi pada awal Islam. Ketika itu, seseorang menuju ke satu kota, sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan tentang kota tersebut. Maka, dia nikah dengan seorang perempuan selama perkiraannya tinggal di kota itu agar ada yang memelihara barangnya dan mengurus kepentingannya. (Ini berlanjut) sampai turunnya firman Allah: "Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki". (HR. Tirmizi).

Riwayat di atas dinilai lemah oleh pakar-pakar hadits, sedangkan pendapat yang menilai akad hubungan lelaki dan perempuan yang bersifat sementara bukanlah perkawinan juga ditolak oleh ulama Syi'ah, bahkan juga oleh sekian banyak ulama Sunnah termasuk az-Zamakhshari, pakar tafsir yang beraliran rasional dan Sunni. "Perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* adalah istri yang sah. Mereka juga dinamai pasangan-pasangan, bahkan merekapun mempunyai hak-hak." Begitu tulisnya.¹⁴

Demikianlah terbaca dari penjelasan masing-masing tentang ketidakjelasan ketetapan hukum nikah *mut'ah* jika merujuk kepada al-Qur'an. Dari segi riwayat pun ditemukan hal serupa. Bahwa nikah *mut'ah* pernah dibenarkan oleh Rasul saw., dan dipraktekkan oleh sementara sahabat beliau,

¹³ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1024 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 194.

tidaklah ditolak oleh siapa pun termasuk seluruh ulama bermazhab Sunnah dan Syi'ah.¹⁵ Dalam *Shahih Muslim* pada bab nikah ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Rasul saw. bersabda pada beberapa kali masa perang:

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

Menurut M. Quraish Shihab, dalam *Shahih Muslim*, demikian juga dalam kitab-kitab shahih lainnya, terdapat juga beberapa riwayat-riwayat yang senada. "Ulama-ulama Sunnah menyatakan bahwa, setelah adanya izin itu, Nabi saw. melarangnya. Banyak sekali riwayat yang shahih dan tegas melarang *mut'ah* setelah sebelumnya pernah dibolehkan." Demikian yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pakar hadits beraliran Sunni. Muhammad Quthub berpendapat bahwa, dalam hal larangan berhubungan seks secara tidak sah, Allah menempuh juga jalan pentahapan, serupa dengan pentahapan larangan meneguk minuman keras. Ini dimulai dengan larangan memaksa perempuan melakukan hubungan (memerkosa), bila ia menginginkan kesucian. Dalam QS. an-Nur [24]: 33 Allah berfirman: "Dan

¹⁵*Ibid.*, hlm.195.

¹⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 130.

janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran bila mereka sendiri menginginkan kesucian dengan tujuan agar kamu meraih keuntungan duniawi". Pada masa inilah nikah *mut'ah* yang didasari kesepakatan bersama dibenarkan, dengan syarat-syarat tertentu yang membedakannya dengan perzinaan. Setelah itu berdasar aneka riwayat datang pengharamannya dan, dengan demikian, tidak dibenarkan lagi segala macam hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang bertujuan langgeng. Pernikahan ini pun pada mulanya masih tidak dibatasi jumlahnya hingga dengan turunnya izin berpoligami yang tidak boleh lebih dari empat orang wanita. Demikianlah menurut Muhammad Quthub.¹⁷

Perlu dicatat bahwa riwayat tentang pelarangan *mut'ah* itu berbeda-beda menyangkut masa dan siapa pembatalnya. Sahabat Nabi saw, Jabir Ibnu Abdillah al-Anshari ra., menyatakan bahwa: "Kami telah melakukan *mut'ah* pada masa Rasulullah saw. juga pada masa Abu Bakar dan Umar (ra.)" (HR. Muslim). Di tempat lain, muslim meriwayatkan bahwa Jabir menguraikan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair (keduanya sahabat Nabi saw.) yang berbeda menyangkut dua *mut'ah*, yakni *mut'ah* haji dan nikah *mut'ah*. Jabir berkata: "Kami melakukan keduanya pada masa Nabi saw, lalu Umar melarang keduanya bagi kami. Maka, kami tidak lagi mengerjakannya".¹⁸

Riwayat ini berarti bahwa Sayyidina Umar-lah yang membatalkan *mut'ah* pada akhir masa pemerintahan beliau. Ada juga yang menyatakan bahwa yang membatalkannya adalah Rasul saw sendiri, yaitu pada Perang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 198.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

Khaibar atau Perang Hunain, kemudian dibolehkan lagi pada hari *Fathu Makkah*, yakni pada hari Rasul saw dan sahabat-sahabat beliau menguasai dan memasuki kembali kota Mekah, tetapi kemudian beliau melarangnya pada hari ketiga Fathu Makkah itu. Riwayat lain—yang lebih kuat—menyatakan bahwa nikah *mut'ah* dilarang secara mutlak pada haji Wada'. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan sementara ulama menilai bahwa riwayat tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan. Menghadapi perbedaan itu, sementara ulama beraliran Sunni menyatakan, "Kalau pun waktu pembatalan *mut'ah* itu diperselisihkan, jika disepakati tentang adanya larangan, larangan itulah yang seharusnya menjadi pegangan, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan".¹⁹

Ulama Syi'ah berargumentasi lain. Menurut mereka, sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini di sini adalah terjadinya izin melakukan *mut'ah* oleh Rasul saw, sedangkan yang diragukan adalah pembatalannya. Di samping itu, ayat an-Nisa' [4]: 24 di atas adalah ayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat tersebut bersumber dari hadits yang sifatnya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat membatalkan yang pasti.²⁰

Alasan kelompok Syi'ah yang terakhir ini sepenuhnya tidak benar karena walaupun QS. an-Nisa' ' [4]: 24 itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi yang pasti itu hanya teksnya, sedangkan penafsirannya yang diduga berbicara tentang *mut'ah*, bukanlah pasti. Ada juga ulama Syi'ah yang menyatakan

¹⁹ Ibid., hlm. 201.

²⁰ Ibid., hlm. 202.

bahwa larangan yang dilakukan oleh khalifah Umar ra. bukanlah larangan berdasar pada hukum agama, melainkan berdasar pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat pada masa beliau. Menurut riwayat, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ra, banyak lelaki yang melakukan *mut'ah* dan sebagai akibatnya lahir anak-anak, tetapi anak-anak itu diingkari/ditelantarkan oleh ayah mereka, atas dasar itu, Umar ra. melarangnya. Memang, khalifah kedua itu dikenal memiliki selaan banyak kebijaksanaan yang sepiantas terlihat bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, kebijaksanaan beliau untuk tidak memberi bagian dari zakat terhadap al-*Mu'allafah Qulubuhum* atau menyatakan jatuhnya talak tiga bagi yang mengucapkannya tiga walaupun dalam satu majelis, padahal pada masa Nabi saw. dan Sayyidina Abu Bakar ra., talak yang dijatuhkan dalam satu majelis hanya terhitung satu talak saja.²¹

Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, ulama besar Tunisia dan Muftinya, menyimpulkan bahwa *mut'ah* diizinkan oleh Rasul saw. dua kali dan beliau melarangnya dua kali juga. Larangan itu menurut Ibnu Asyur bukan pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Mut'ah* tulisnya lebih jauh terbukti dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar ra. dan Umar Ibnu al-Khatthab ra. Khalifah kedua inilah yang pada akhir masa kekhalifahannya—melarang nikah *mut'ah* untuk selamanya. Akhirnya, Ibnu Asyur—yang bermazhab Sunni Maliki itu—

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri.²²

Pendapat Ibnu Asyur di atas, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan pendapat ulama-ulama Syi'ah, tetap ditolak oleh banyak ulama Sunnah, sebagaimana ditolak juga oleh ulama Syi'ah.

Menurut M. Quraish Shihab, disamping alasan-alasan berdasar al-Qur'an dan Sunnah di atas, sementara ulama dan cendekiawan kontemporer mengemukakan sekian alasan untuk mendukung atau menampik nikah *mut'ah*. Ada tiga hal yang dinilai oleh sementara pemikir yang dapat menjadi keistimewaan pernikahan *mut'ah*. Pertama, karena tujuan pernikahan *mut'ah* bukan untuk memperoleh keturunan, problema anak tidak perlu dipikirkan. Kedua, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan karena sejak semula perceraian telah direncanakan dan disepakati. Ketiga, membantu para muda-mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan pokok itu, atau memaksa mereka menanti hingga mereka siap secara material, dapat mengantar mereka terjerumus di lembah yang tercemar.²³

Abbas al-Aqqad (1964 M), seorang cendekiawan muslim Mesir yang diakui otoritas dan integritas pribadinya—ketika berbicara tentang problema yang dihadapi muda-mudi dewasa ini yang seringkali tidak dapat menikah kecuali setelah mencapai usia tiga puluhan karena berbagai faktor menilai jalan keluar yang diusulkan oleh Bertrand Russel (1872-1970 M) sebagai jalan

²² *Ibid.*, hlm. 204.

²³ *Ibid.*, hlm. 2005.

keluar yang ideal, khususnya bagi muda-mudi yang sedang melanjutkan studi tanpa mampu menikah. Filosof Inggris itu mengusulkan agar pada saat orangtua muda-mudi itu tetap memberi mereka biaya studi, pada saat yang sama muda-mudi "menikah" sambil menghindari lahirnya anak. Jika mereka telah selesai dalam studi, mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka atau mengakhirinya dengan baik. Al-Aqqad berkomentar: "Islam telah memberi jalan keluar menyangkut problema semacam ini terhadap anggota militer, yakni dengan nikah *mut'ah*, dengan mengizinkan mereka yang meninggalkan istrinya itu untuk nikah *mut'ah*. Agaknya—kata al-Aqqad—tidaldah keliru menganalogikan siapa yang melakukan studi dengan tentara yang terlibat dalam peperangan".²⁴

Menurut M. Quraish Shihab, sebelum Russel, Ketua Pengadilan Denver Amerika Serikat—Lendsy—pernah mengusulkan hal serupa yang dinamainya pernikahan persahabatan. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak dengan keras oleh agamawan dan moralis pada masanya karena dinilai lebih mementingkan "kebahagiaan muda-mudi" ketimbang menanamkan rasa berdosa pada mereka sehingga, pada akhirnya, hakim itu terdepak dari kedudukan yang dia tekuni bertahun-tahun. Demikianlah alasan mereka yang mendukung nikah *mut'ah*.²⁵

Akan tetapi kata cendekiawan lain dibolehkannya pernikahan *mut'ah* dapat mengantarkan kepada pelecehan terhadap perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa bila seseorang ditanya, "Setujukah Anda jika anak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2006.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 207.

perempuan Anda dinikahi secara *mut'ah*?" Dapat diduga keras jawabannya adalah "Tidak!" Dugaan keras ini diperkuat lagi dengan kenyataan yang terjadi di Iran di mana perempuan-perempuan yang bermazhab Syi'ah sekalipun enggan dinikahi secara *mut'ah*. Bahkan, salah satu alasan ulama mereka antara lain Murtadha Muthahhari—dalam argumentasi tentang bolehnya *mut'ah* adalah menghidupkan kembali sunnah yang telah terlupakan/terabaikan. Ini menunjukkan bahwa *mut'ah* tidak populer lagi. Cendekiawan lain yang menolak *mut'ah* menyatakan juga bahwa pernikahan itu serupa dengan jual belt atau penyewaan alat kelamin. Begitu selesai dipakai, ia "dibuang" atau dikembalikan kepada pemiliknya. Ini bukanlah perangai seorang yang sopan karena yang dipersewakannya adalah sesuatu yang sangat berarti. Inilah salah satu perwujudan dari peribahasa: "Habis manis sepah dibuang".²⁶

Di samping itu, membenarkan *mut'ah* dapat membuka peluang yang sangat besar bagi lelaki hidung belang dan perempuan jalang untuk melakukan praktik perzinaan atas nama agama, apalagi pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi, seperti diakui sendiri oleh ulama-ulama yang membenarkannya. Kekhawatiran terbukanya peluang itu terlihat dengan jelas dewasa ini.²⁷

Pernikahan, apa pun nama dan alasannya, tidak dapat mencapai pulau bahagia jika tidak disertai dengan niat ingin hidup bersama dalam kebahagiaan yang langgeng. Karena itu, tidaklah wajar dinamai pernikahan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 209.

bila sejak semula telah ada niat untuk membatalkannya pada waktu tertentu karena, ketika itu, tidak ada ketulusan untuk membagi kebahagiaan dengan pasangan, yang ada hanyalah memenuhi kebutuhan sesaat, kebutuhan seksual, atau kebutuhan lainnya.

Sementara pakar berpendapat bahwa sebab kegagalan pernikahan banyak artis adalah karena sebagian mereka memang tidak bertujuan menjalin hubungan yang langgeng. Pernikahan mereka adalah kepentingan bersama untuk mencapai tujuan masing-masing yang sifatnya sementara. Sebagian mereka menikah untuk menambah popularitas dengan memainkan adegan pencinta sejati yang sehidup semati, bagai Laila dan Majnun atau Romeo dan Juliet. Namun, itu sekadar adegan sehingga jika mereka telah "hidup kembali" dalam kenyataan, mereka menemukan sesuatu yang lain, yang mengantar mereka bercerai tetapi untuk memainkan adegan yang lain lagi.

Pernikahan adalah penyatuan rasa, karena itu, perceraian sangatlah berat dialami, kendati perceraian itu membebaskan yang bercerai dari neraka rumah tangga. Ini karena yang bercerai merasa telah gagal membina rumah tangga yang langgeng. Menjalinkan hubungan dengan perempuan, walaupun atas nama pernikahan, jika tidak bertujuan langgeng dan tidak didasari oleh keinginan menyatukan rasa, tidaklah wajar dinamai ikatan suci, padahal pernikahan seharusnya merupakan ikatan suci.²⁸

Kawin-mawin setiap saat dengan berganti-ganti pasangan dengan dalih *mut'ah* menjadikan praktik tersebut mengarah semata-mata kepada

²⁸*Ibid.*, hlm. 209.

pelampiasan nafsu seksual. Seks memang penting. Ia pun suci bila disalurkan melalui cara dan tempat yang suci. Namun, seseorang yang bertakwa tidaklah memperturutkan hawa nafsunya. Dia harus berupaya untuk mengendalikannya, tanpa mengekanginya. Nafsu—termasuk nafsu seksual—selalu akan menuntut dan menuntut, serta tidak pernah akan puas.

Pernikahan dimaksudkan antara lain untuk meraih *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Sedangkan, itu semua sama sekali tidak mungkin tercapai melalui praktik nikah *mut'ah*. Bagaimana mungkin *mawaddah* lahir kalau hubungan hanya terjalin sebulan atau dua bulan, apalagi kalau hanya beberapa hari? Bagaimana mungkin timbul cinta kasih, atau saling percaya, jika seseorang dapat seenaknya berganti-ganti pasangan?²⁹

Nikah *mut'ah* yang merupakan hubungan seksual yang ditetapkan batas waktunya itu sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari Kemudian (baca QS. Yasin [36]: 56).

Di samping itu, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.³⁰

Karena itu menurut M. Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sekali lagi kalau ia dapat diterima sebagai

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

sesuatu yang bersifat **kebutuhan yang sangat mendesak**, atau bahkan **darurat**, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Imam-imam mazhab Syi'ah yang membenarkan nikah *mut'ah* pun menegaskan bahwa *mut'ah* hendaknya tidak dilakukan bagi yang memiliki istri. Ali Ibnu Yaqthin yang telah memiliki pasangan bertanya kepada Imam ar-Ridha (Imam mazhab Syi'ah ke-8, 770-818 M) tentang *mut'ah*.³¹ Maka, cucu Imam Ja'far ash-Shadiq as. (Imam mazhab Syi'ah ke-6, 699-765 M) itu menjawab: "Apa hubunganmu dengan itu? Allah telah menjadikanmu tidak membutuhkannya (yakni karena engkau telah beristri), "Di kali lain, pertanyaan serupa beliau jawab: artinya: Ia (*mut'ah*) memang halal, ia mubah bagi yang belum dianugerahi Allah pasangan. (Kalau dia telah menikah) maka itu mubah bila ia jauh dari istrinya."

Jawaban Imam ar-Ridha as. di atas berarti yang beristri boleh melakukan *mut'ah* kalau memang kebutuhan seksualnya sedemikian mendesak sehingga ia khawatir terjerumus dalam dosa. Di sisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat. Imam Ja'far ash-Shadiq as.³² ketika ditanya tentang *mut'ah*, dia menjawab: artinya: "*Mut'ah* halal tetapi janganlah menikah kecuali dengan perempuan yang suci/terhormat. Allah berfirman (tentang orang mukmin); 'Mereka itu adalah pemelihara-pemelihara kemaluan mereka'".

³¹ *Ibid.*, hlm. 210.

³² *Ibid.*, hlm. 210.

Tentu saja, untuk mengetahui bahwa perempuan ini baik-baik atau tidak, diperlukan kehati-hatian dan pengamatan yang saksama. Dengan demikian, sungguh sangat jauh dari tuntunan agama, bahkan dari tuntunan mazhab Syi'ah sekalipun, kelakuan mereka yang dengan seenaknya masuk keluar kampung lalu menerima tawaran atau mencari perempuan yang bersedia ditiduri atas nama *mut'ah*.

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq ketika menjawab pertanyaan tentang *mut'ah*, beliau membaca firman Allah dalam QS. an-Nur [24]: 3: "Lelaki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". Atas dasar jawaban beliau itu, para ulama Syi'ah menyatakan bahwa: "Siapa yang melakukan *mut'ah* terhadap perempuan pezina, dia adalah pezina pula".³³

Demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh ulama-ulama yang membenarkan nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya.

Menurut M. Quraish Shihab, nikah *mut'ah* berbeda dengan nikah sunnah. Berikut ini penulis kemukakan beberapa perbedaan antara pernikahan yang bersifat sementara itu, yakni nikah *mut'ah*, dan pernikahan sunnah, yakni yang dipraktekkan oleh Rasul saw dan merupakan cara hidup beliau sehingga

³³ *Ibid.*, hlm. 211.

siapa yang tidak menyukainya maka tidaklah dia termasuk kelompok Rasul saw.

Ulama-ulama bermazhab Syi'ah Imamiyah sepakat menyatakan:

- a. Perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang dewasa dan berakal, serta terbebaskan dari segala halangan pernikahan, seperti larangan menikahi *mahram* baik karena keturunan maupun penyusuan juga perempuan yang sedang bersuami, atau yang menjalani masa *iddah* perceraian atau mati, demikian juga perempuan musyrikah. Demikian juga sebaliknya, perempuan tidak boleh menikahi lelaki yang memiliki halangan-halangan pernikahan.
- b. Tidak sah pernikahan *mut'ah* kecuali melalui ijab dan kabul yang redaksinya tidak boleh dengan: "Kuserahkan diriku untukmu, atau kuhadiahkan, atau kubolehkan engkau menggauliku", tetapi harus dengan salah satu dari tiga lafadz, yakni nikah, *zawaj* (kawin), dan *mut'ah*.
- c. Akad dalam nikah *mut'ah*, sebagaimana dalam nikah sunnah, bersifat mengikat, baik terhadap lelaki maupun perempuan. Sebagaimana dalam pernikahan sunnah, lelaki dapat menalak istrinya, demikian pula dalam nikah *mut'ah*, lelaki dapat memberi hak bagi istrinya untuk bebas sebelum masa yang disepakati.
- d. Pernikahan *mut'ah* menyebarkan aneka keharaman, sebagaimana pernikahan sunnah. Anak dari salah seorang pasangan suami atau istri yang menikah *mut'ah*—sebagaimana yang menikah secara sunnah—menjadi anak tiri dari pasangannya. Demikian juga halnya dengan

penyusuannya memberi dampak sebagaimana dampak pernikahan sunnah.

Ini berbeda dengan perzinaan.

- e. Anak yang lahir dari pernikahan *mut'ah* sama kedudukannya dengan anak yang lahir dari pernikahan sunnah, antara lain dalam hal waris-mewarisi.
- f. Anak yang lahir dari pernikahan *mut'ah*, dinisbahkan kepada suami yang menggauli ibu anak itu, selama telah terjadi jima' (hubungan suami istri), walaupun suami melakukan '*azl* yakni menumpahkan spermanya di luar rahim.
- g. Semua persyaratan dalam akad nikah *mut'ah*, yang dibenarkan oleh agama, harus dipenuhi sebagaimana halnya dalam nikah sunnah.
- h. Tidak dibenarkan melakukan hubungan seks selama istri masih sedang haid baik pernikahan *mut'ah* maupun sunnah.
- i. Tidak boleh menggabung pernikahan saudara perempuan istri, sebagaimana halnya dalam pernikahan sunnah.³⁴

Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan nikah *mut'ah* dengan nikah sunnah antara lain adalah:

- a. Dalam nikah *mut'ah*, harus disebutkan batas waktu yang jelas dan disepakati untuk hidup bersama. Kalau tidak disebut, menurut sementara ulama Syi'ah, ia menjadi langgeng dan menurut ulama lainnya ia menjadi tidak sah; sedangkan, dalam nikah sunnah tidak boleh disebut batas waktu karena seharusnya ia langgeng.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 211.

- b. Mahar merupakan rukun nikah sehingga bila tidak disebutkan dalam akad, pernikahan *mut'ah* tidak sah. Sedangkan, dalam nikah sunnah, mahar bukan rukun sehingga bila tidak disebut dalam akad, nikah tetap dinilai sah. Bila kemudian suami mencampuri istrinya, maharnya adalah Mahar *al-Mitsl*, yakni sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya.
- c. Iddah (masa tunggu) bagi yang nikah *mut'ah*, setelah habis masa perjanjian nikah, adalah dua kali haid. Ini berbeda dengan yang diceraikan pada nikah sunnah yang iddahnya tiga kali haid. Sedangkan yang hamil baik yang menikah secara sunnah maupun yang menikah secara *mut'ah* iddahnya adalah setelah melahirkan, kecuali jika dia melahirkan sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.
- d. Suami istri dalam nikah sunnah saling mewarisi, sedangkan dalam nikah *mut'ah* diperselisihkan. Ada yang berpendapat saling mewarisi dan ada juga yang berpendapat tidak saling mewarisi. Namun, semua sepakat bahwa kalau dalam akad disepakati syarat saling mewarisi, syarat tersebut mengikat kedua belah pihak.
- e. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* kecuali bila disyaratkan dalam akad. Berbeda dengan nikah sunnah, ia merupakan kewajiban suami.
- f. Sementara ulama Syi'ah berpendapat bahwa dalam nikah *mut'ah* dibolehkan bagi lelaki untuk menikah lebih dari empat perempuan dalam

saat yang sama, sedangkan dalam nikah sunnah tidak dibenarkan bagi seorang lelaki menikahi lebih dari empat orang istri dalam saat bersamaan. Ulama Syi'ah yang lain mempersamakan nikah sunnah dan *mut'ah* dalam hal tidak boleh melebihi empat orang perempuan.³⁵

Demikian beberapa persamaan dan perbedaan antara nikah *mut'ah* dan nikah sunnah. Di samping apa yang disebut di atas, perlu juga dicatat bahwa dalam hal rukun dan sahnya pernikahan terdapat juga perbedaan-perbedaan, tetapi hal tersebut sejalan dengan pendapat sementara mazhab Sunni. Misalnya, peranan wali dalam pernikahan menurut mazhab Syi'ah Imamiyah tidaklah mutlak kecuali bagi gadis atau anak yang belum dewasa. Ini sama dengan pendapat Daud az-Zahiri. Dalam pandangan (mazhab) Abu Hanifah, demikian juga Zufar asy-Sya'bi dan az-Zuhri, kalau seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang setara dengannya—walaupun tanpa wali maka nikahnya sah.

Menyangkut saksi, dalam pandangan Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, kehadiran saksi merupakan syarat bagi sahnya pernikahan. Hanya saja, mereka berbedapendapat apakah kehadiran saksi itu diperlukan saat akad atau ketika akan bercampur dengan menyampaikan kepada dua orang bahwa mereka telah berstatus suami istri. Syi'ah Imamiyah tidak mensyaratkan adanya saksi bagi sahnya pernikahan, kendati mereka sangat menganjurkan kehadirannya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu

³⁵ *Ibid.*, hlm. 212.

Tsaur. Namun, semua berpendapat bahwa, setelah selesai pernikahan, sebaiknya berita pernikahan itu disebarluaskan.³⁶

C. Metode M. Quraish Shihab

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan nikah *mut'ah*, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, yaitu tentang nikah *mut'ah* kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca

³⁶ *Ibid.*, hlm. 211.

sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.³⁷

Dengan demikian, dasar pijakan yang diambil oleh Quraish Shihab dalam menggunakan metode *istinbat* hukum ialah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas.

Pertama, al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah SWT, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammd saw., ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syari'at. Al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah bahkan al-Qur'an melarang para sahabat banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum-hukum yang belum diperlukan. Sebab, jangan sampai terjadi karena banyak pertanyaan akan mengakibatkan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti kasus seorang Yahudi yang banyak bertanya tentang bagaimana sapi yang harus mereka sembelih. Terhadap sesuatu yang menjadi

³⁷Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakartam, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 366

penyakit masyarakat, beban-beban hukumnya pun diberikan secara bertahap, seperti hukum zina misalnya.

Kedua, mengenai sunnah dan hadits,³⁸ yaitu berupa ucapan Muhammad saw, perbuatannya dan termasuk pula pengakuannya. Sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadits dengan: segala perbuatan, ucapan dan taqrir.

Ketiga, sebagai sumber hukum yang ketiga ialah ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Kerena itu, dasar yang melahirkan ijma' adalah permusyawaratan.

Keempat, qiyas³⁹ yaitu menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash, karena di antara keduanya terdapat pertautan (persoalan), *illat* hukum. Qiyas sebagai sumber hukum terletak pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ini mengandung pengertian bahwa qiyas baru bisa dipergunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum

³⁸Hadits ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan yang sebagainya. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisahar Musthalah al-Hadits*, Cet. 4, Bandung: PT al-Ma'arif, 1995, hlm. 6. TM. Hasbi Ash S *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 22-23.

³⁹Menurut Hanafie dari segi bahasa, qiyas ialah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. lihat Hanafie, *Ushul Fiqh*, Cet. 14, Jakarta: Wijaya 2001, hlm. 128. Cf. Sobhi Mahmassani, *falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, "Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern", Bandung: PT. Al-Maarif, 1976, hlm. 167-177.

dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Dengan kata lain, qiyas dipergunakan dalam keadaan terpaksa.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT M. QURAISH

SHIHAB TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan.¹ Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Ditinjau dari segi waktu, nikah itu

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: Islamic Book Service by American Trust Publication, 1977, hlm. 50.

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

ada dua macam yaitu nikah *da'im* (nikah kekal) dan nikah *mut'ah* (pernikahan untuk masa tertentu).⁴

Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari pernikahan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada pernikahan biasa dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.⁵

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* itu yang dijadikan dalil

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1346.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393.

oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah ini ialah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulunya sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama kebolehan, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehan bersifat diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* menjelaskan bahwa

Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 394.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

Dengan mencermati paparan di atas, maka salah seorang ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.⁸ Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.⁹ Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".¹⁰

Pendapatnya yang kontroversil ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama yaitu M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya.

Pendapat M. Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan dalam kondisi **darurat** yaitu untuk menghindari perzinahan karena suami dalam jangka waktu yang lama tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis disebabkan keberadaan keduanya yang sangat berjauhan. Pengertian **darurat** di sini bila dihubungkan dengan ushul fiqh maka dapat dihubungkan

⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 187.

⁹*Ibid.*, hlm. 203.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 204.

dengan konsep *azimah* dan *rukhsah* yang oleh Abdul Wahab Khallaf dijelaskan sebagai berikut:

Rukhsah ialah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini. Atau *rukhsah* ialah sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus, atau ia adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil, disertai adanya dalil larangan.¹¹

Adapun *'azimah* ialah: Hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak tertentu pada satu keadaan saja bukan Keadaan lainnya, bukan pula khusus seorang mukallaf, dan tidak mukallaf lainnya. Di antara *rukhsah* ialah pembolehan hal-hal yang dilarang dalam keadaan dharurat atau kebutuhan. Misalnya, seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kata "*kufr*", ia diperbolehkan mengucapkan kalimat itu, sebagai suatu keringanan, dan hatinya tetap tenang dengan imannya. Demikian pula orang yang dipaksa untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan, atau dipaksa untuk merusakkan harta orang lain; maka ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang yang dipaksakan terhadapnya, sebagai keringanan baginya. Orang yang terpaksa oleh lapar yang berat atau haus yang sangat untuk memakan bangkai atau meminum khamar maka ia diperbolehkan untuk memakannya dan meminumnya.

¹¹ Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 100

Di antara *rukshah* adalah pembolehan meninggalkan wajib, apabila ada *udzur* (alasan) yang membuat pelaksanaannya memberatkan pada mukallaf. Barang siapa yang berada dalam keadaan sakit atau bepergian pada bulan Ramadhan, maka ia diperbolehkan berbuka puasa. Barang siapa yang sedang bepergian, maka ia diperbolehkan untuk mengqashar (memendekkan) shalat empat rakaat, yakni melaksanakannya dua rakaat sebagai ganti empat rakaat.¹²

Sebelum menganalisis pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, maka agar analisis menjadi lengkap dan jelas, ada baiknya selang pandang diketengahkan pendapat para ulama tentang nikah *mut'ah*.

Ulama Syafiiyah menjelaskan delapan macam pernikahan yang termasuk bathil: (1) nikah *syighar*; yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa mahar; karena wali yang menikahkan juga menikah dengan anak atau saudara perempuan dari laki-laki yang dinikahkannya juga tanpa mahar; (2) nikah *mut'ah*; (3) nikah bagi orang yang sedang melakukan ihram; (4) berbilang suami (*poliandri*); (5) nikah perempuan yang berada dalam waktu tunggu (*'iddah*); (6) pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya pada waktu anak yang dikandungnya belum dilahirkan; (7) perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan dari kalangan kafirah yang bukan ahli kitab; (8) perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki dari kalangan orang kafir. Sedangkan ulama Hanabilah, menjelaskan bahwa pernikahan yang termasuk

¹²*Ibid*, hlm. 101.

bathil adalah: (1) nikah *syighar*; (2) nikah *muhallil*; (3) nikah *mut'ah*; dan (4) nikah *mu'allaq*.¹³

Setelah mengkaji pendapat M. Quraish Shihab dan pendapat ulama lain, maka penulis mendukung pendapat M. Quraish Shihab karena untuk menghindari perzinaan. Apabila seorang suami pergi dalam waktu yang sangat lama dan menetap di suatu tempat atau negeri lain tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis, maka nikah *mut'ah* merupakan dapat dibenarkan karena alasan darurat untuk menghindari perzinaan.

Pendapat M. Quraish Shihab pada dasarnya tidak hanya menguntungkan pihak pria tapi juga wanita. Jika nikah *mut'ah* diharamkan padahal keadaan memenuhi syarat untuk melakukan itu, maka akan banyak suami yang menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan perzinaan seperti melacur. Hal ini justru bisa membahayakan isterinya yaitu penyakit kotor bisa menular pada isterinya.

Menurut penulis bahwa pendapat M. Quraish Shihab sangat realistis karena pergaulan bebas tanpa nikah berisiko negatif yang lebih besar daripada nikah *mut'ah*. Pergaulan bebas justeru akan menimbulkan jatuhnya korban karena pelaku bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Sedangkan nikah *mut'ah* lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa asal kata *mut'ah* ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah diceraikan. Demikian pula kata

¹³Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 133.

kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yang berarti "menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji *tamattu'* disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.

Apa yang diketengahkan sebelumnya adalah menyangkut segi positif dari nikah *mut'ah*. Adapun risiko atau segi negatifnya nikah *mut'ah* adalah *pertama*, merusak dan menyimpang dari sifat dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan untuk selama-lamanya. Sedangkan nikah *mut'ah* dibatasi waktunya. *Kedua*, pada dasarnya nikah *mut'ah* seperti mempersamakan posisi perempuan seperti barang. Sesudah dipakai maka kapan saja barang itu dapat dibuang. *Ketiga*, nikah *mut'ah* pada prinsipnya tidak membuat keberlangsungan keturunan. Karena sesudah masa waktunya habis maka perempuan itu ditinggalkannya.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah

Dalil yang digunakan M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah hadis dari Umayyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيَّةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَغْنِيٍّ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ
يَغْنِيٍّ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ

بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ (رواه مسلم)¹⁴

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*." (HR. Muslim).

Adapun metode *istinbat* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab adalah *qiyas* yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat ditinggalkan karena *uzur* syar'i, salat yang dapat dijama dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan selain bangkai.

Menurut beberapa hadis, bahwa penghapusan nikah *mut'ah* dilakukan Rasulullah Saw. pada tempat dan waktu yang berbeda. Menurut ulama, tempat dan waktu tersebut adalah pada Perang Khaibar, umrah qadha, Fathu Makkah, Perang Authas, dan Perang Tabuk, dan Haji Wada'.

Yang betul, kebolehan nikah *mut'ah* dan larangannya terjadi dua kali, **pertama**, diperbolehkan pada Perang Khaibar, kemudian diharamkan sesudahnya, **kedua**, diperbolehkan pada Fathu Makkah, yaitu pada Perang Authas kemudian diharamkan setelah itu untuk selamanya. Pendapat ini juga diikuti sejumlah besar ulama.

Terjadinya perbedaan keterangan tentang batas waktu keharaman nikah *mut'ah* pada waktu yang berbeda, kemungkinan besar karena keraguan

¹⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth hlm. 130.

sebagian para sahabat. Kemungkinan, sebagian sahabat belum mendengar larangan tersebut sehingga mereka beranggapan bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan pada saat tertentu. Oleh karena itu, perlu diutarakan pengumuman larangan tersebut berulang kali. Kalau bukan karena keraguan tadi, tentunya Umar r.a. tidak memandang perlu mengulangi larangan tersebut pada masanya. Pengulangan larangan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya untuk meninggalkan perbuatan itu.

C. Aktualisasinya Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah dengan Konteks Pernikahan di Indonesia

Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa apabila menimbang pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dalam konteks pernikahan di Indonesia, dengan kata lain bahwa aktualisasi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia dapat ditegaskan sebagai berikut:

Penulis melihat bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri masalah *mut'ah* ini tidak tertera secara eksplisit. Namun, apabila mengambil pemahaman dari semangat ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksud dan tujuan perkawinan, hikmah-hikmahnya dan sebagainya, dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara asalkan keadaannya darurat yaitu tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali menikah maka hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau dilihat, bahwa *mut'ah* tersebut tidak merusak peradaban dan tidak bertentangan dengan etika kemanusiaan. Di

samping itu, tidaklah berarti melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Yang dapat penulis tangkap dari *mut'ah* itu tidak lebih dari rem darurat. Tidak sedikit pun tersirat adanya itikad buruk dari maksud penghalalan nikah *mut'ah*, seperti *ta'abbud*, maksud ibadah kepada Tuhan, Allah SWT, tolong-menolong antara suami istri dan lain-lain, sebagai bagian dari tujuan perkawinan Islam. Oleh karena itu, sangat kurang bijak kalau jumhur ulama mengharamkannya.

Di samping itu, *mut'ah* tidak mendatangkan mudarat bagi wanita, karena wanita tidak dibuang melainkan ia dalam perlindungan dan jaminan. Mudarat yang lebih besar akan menimpa anak turunan seandainya dalam nikah *mut'ah* dalam keadaan darurat tidak dibenarkan. Penyakit kotor dari akibat suami melacur akan lebih banyak lagi. Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Karena orang yang dianggap ayahnya telah terkena penyakit yang berat seperti AID misalnya.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat penulis tegaskan bahwa masalah nikah *mut'ah* apakah sekarang masih berlaku atau tidak merupakan obyek kajian ijtihad, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Berdasarkan tujuan perkawinan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat (tidak ada pilihan yang lebih baik dan nikah *mut'ah* sebagai pilihan yang risikonya lebih kecil) tentu dapat dipertimbangkan dan

dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya. Mengharamkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus dipertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan, meskipun tentunya perzinaan jangan dijadikan sebagai satu-satunya alasan pembenaran nikah *mut'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan dalam situasi darurat guna menghindari perzinahan. Menurut M. Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.

Imam-imam mazhab Syi'ah yang membenarkan nikah *mut'ah* pun menegaskan bahwa *mut'ah* tidak dilakukan bagi yang memiliki istri. Ali Ibnu Yaqthin yang telah memiliki pasangan bertanya kepada Imam ar-Ridha (Imam mazhab Syi'ah ke-8, 770-818 M) tentang *mut'ah*. Maka, cucu Imam Ja'far ash-Shadiq as.

2. *Istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* yaitu hadis dari Umaiyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim. Sedangkan *istinbat* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab adalah *qiyas* yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat ditinggalkan karena

uzur syar'i, salat yang dapat dijama dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan selain bangkai.

3. Aktualisasi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia dapat ditegaskan bahwa masalah nikah *mut'ah* apakah sekarang masih berlaku atau tidak merupakan obyek kajian ijtihad, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Berdasarkan tujuan perkawinan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat (tidak ada pilihan yang lebih baik dan nikah *mut'ah* sebagai pilihan yang risikonya lebih kecil) tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya. Mengharamkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus dipertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan, meskipun tentunya perzinaan jangan dijadikan sebagai satu-satunya alasan pembenaran nikah *mut'ah*.

B. Saran

M. Quraish Shihab, selain salah seorang ahli tafsir kontemporer di Indonesia, ia juga banyak menaruh perhatian terhadap persoalan perkawinan yang selama ini berkembang. Ia, memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Atas dasar itu tidak

berlebihan jika pendapat dan pemikirannya dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al'ati, Hammudah Abd., *The Family Structure In Islam*, Washington Street: Islamic Book Service by American Trust Publication, 1977.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1024 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muslim, Imam, *Sahîh Muslim*, Juz.II, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Nikah di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syakir, Muhammad Fu'ad, *Zawajun Bathil: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, "Nikah Terlarang: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah", Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matun Nizlah

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 21-09-1984

Alamat Asal : Krasak RT 01 RW 04 Pecangaan Jepara

Pendidikan : - SDN 3 Krasak Jepara lulus th. 1997

- MTs Salafiyah Kajen Pati lulus th. 2000

- MA. Banat NU Kudus lulus th. 2003

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ni'matun Nizlah